PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2019

BANGKINANG KOTA, MARET 2019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2019.

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) merupakan kewajiban setiap Instansi, tidak terkecuali Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. Ini sesuai dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Demikian Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2019 ini disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat, amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bangkinang, Maret 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAMPAR
SEKRETARIS

HAMBALI, SE, MH
NIP. 19681024 200003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……..…… I
DAFTAR ISI ……..…. II

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ……..……..1
1.2. Landasan Hukum ……..….3
1.3. Maksud dan Tujuan ……..……5
1.4. Sistimatika Penulisan ……..……..….6

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD …..……..……...7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD ……..……..……17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ……..……19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……...……..……22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……..…… 29

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …… 30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD …..……..…31
3.3 Program Kegiatan …… 32

BAB. IV PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Penjabaran yang lebih teknis dari Renstra OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan OPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar khususnya dan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar daerah pada umumnya. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja OPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yaitu OPD Satuan Polisi Pamong Praja, yang dalam penyusunannya harus sinkron dan berpedoman pada RKPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun indikator rencana kinerja meliputi: sasaran, program dan kegiatan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sebagai salah satu dinas teknis di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar merupakan OPD yang menyelenggarakan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang merupakan salah satu dari 6 (enam) urusan Wajib Pelayanan Dasar. Adapun Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bupati Kampar Nomor 60 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, OPD ini mempunyai fungsi antara lain :

1. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
2. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
3. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Sebagai suatu instansi yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dengan berpijak pada tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar mempunyai Visi sesuai rancangan Renstra 2017-2022 yaitu : ” TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG TA’AT PERATURAN, TERTIB DAN TENTERAM MELALUI

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN KEPALA DAERAH, KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT*"*.

Visi tersebut menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar selama periode 2017-2022 untuk berusaha mewujudkan harapan-harapan yang akan dicapai sesuai dengan tugas-tugas yang menjadi kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun tugas-tugas yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dengan berpijak pada visi yang telah dicanangkan, secara lebih jelas terurai dalam misi-misi sebagaimana berikut :

1. Terwujudnya Polisi Pamong Praja yang Handal,Tangguh dan Profesional.
2. Meningkatkan Wibawa Pemerintah Daerah melalui Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Meningkatkan Pembinaan Perlindungan Masyarakat yang semakin Baik
4. Meningkatkan Kepatuhan dan Ketaatan Terhadap Perda, Perkada dan Keputusan Kepala Daerah oleh Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha
5. Menata Keindahan, Kerapian, Kebersihan Baik Internal Maupun Eksternal

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
18. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
22. Peraturan Bupati Kampar Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar ini adalah untuk mengevaluasi kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 dan merumuskan rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 dalam rangka penyusunan RKA OPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019

1.2 Tujuan

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2019;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

5. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar;
6. Program – program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas

1.4 Sistimatika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Bab I : Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab.Kampar 2018
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan OPD
- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan Usulan 2019 BAB IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Kampar adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Kampar. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Kampar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Kampar selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut

1. A. Penetapan Indikator Kinerja

   Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

C. Evaluasi Program Tahun 2017

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar pada Tahun 2016 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Kampar. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
   Kegiatan :
   1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   2. Penyediaan jasa kebersihan kantor
   3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
   4. Penyediaan alat tulis kantor
   5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   7. Penyediaan makanan dan minuman
   8. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
   9. Penyediaan jasa tenaga harian lepas
   10. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

	Anggaran	:	Rp. 9.925.886.564,00
	Realisasi	:	Rp. 9.398.559.084,00
	Persentase Realisasi	:	95 % (sampai dengan 31 Desember 2017)
2.	Program	:	Peningkatan sarana prasarana aparatur
	Kegiatan	:	1. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 2. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
	Anggaran	:	Rp. 361.596.450,00
	Realisasi	:	Rp. 271.655.250,00
	Persentase Realisasi	:	71% (sampai dengan 31 Desember 2017)
3.	Program	:	Peningkatan disiplin aparatur
	Kegiatan	:	1. Pengadaan Pakaian kerja lapangan.
	Anggaran	:	Rp. 211.680.000,00
	Realisasi	:	Rp. 199.321.000,00
	Persentase Realisasi	:	94% (sampai dengan 31 Desember 2017)
4.	Program	:	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
	Kegiatan	:	1. Latihan dan Atraksi Marching Band 2. Bimtek Penatausahaan Barang Milik
	Anggaran	:	Rp. 26.450.000,00
	Realisasi	:	Rp. 15.400.000,00
	Persentase Realisasi	:	58 %(sampai dengan 31 Desember 2017)
5.	Program	:	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Kegiatan	:	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3. Penyusunan Renstra

	Anggaran	:	Rp. 22.500.000,00
	Realisasi	:	Rp. 22.500.000,00
	Persentasi Realisasi	:	00.% (sampai dengan 31 Desember 2017)
6.	Program	:	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
	Kegiatan	:	1. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.
	Anggaran	:	Rp. 127.618.300,00
	Realisasi	:	Rp. 127.618.300,00
	Persentase Realisasi	:	100% (sampai dengan 31 Desember 2017)
7.	Program	:	Pemeliharaan Kontrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
	Kegiatan	:	1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2. Pelaksanaan patroli dan pengawasan lingkungan masyarakat. 3. Pengamanan Pemilu. 4. Kegiatan TIM Justisi dalam Penertiban Perda. 5. Meningkatkan Ketrampilan dan Ketahanan Anggota Satpol PP. 6. Pengamanan Porprov 7. Pengamanan Pejabat dan Org2 Penting 8. Pengamanan Tempat2 Penting.
	Anggaran	:	Rp. 4.632.289.100,00
	Realisasi	:	Rp. 3.971.048.750,00
	Persentase Realisasi	:	86 % (sampai dengan 31 Desember 2017)

8.	Program	:	Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan
	Kegiatan	:	1. Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan Anggota Satpol. PP
	Anggaran	:	Rp. 33.575.000,00
	Realisasi	:	Rp. 33.575.000,00
	Persentase Realisasi	:	100% (sampai dengan 31 Desember 2017)

Anggaran Tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sebesar Rp. 15.355.179.214,00 (sudah termasuk perubahan) dengan 9 (sembilan) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 13.879.559.084,00 (hingga 31 Desember 2017) dengan capaian kinerja keuangan sebesar 84 %.

Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2017 diperoleh hasil capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sebesar 84 %. Dengan capain kinerja sebesar 84 % tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil/ sangat memuaskan dalam pencapaian kinerjanya pada tahun 2017.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2017

Untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 12.932.791.914,00 (sebelum perubahan) terurai dalam 9 (sembilan) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal 98 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar

Untuk melakukan analisis pencapaian kinerja dilakukan analisa berupa parameter dan variabel antara lain keberhasilan, kegagalan, hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas, sehingga dari hambatan dan kendala ditemui adanya keberhasilan yang diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut :

NO	PARAMETER	VARIABEL	INDIKATOR
1.	- Keberhasilan	- Pendapatan PAD meningkat melalui dinas instansi terkait. - Meningkatkan keamanan dan ketentraman. - Dapat memberantas penyakit masyarakat. - Teriventarisasinya perusahaan atau masyarakat yang belum memiliki izin. - Semakin kecilnya angka pelanggaran perusahaan/ masyarakat terhadap perda - Dapat menetralisir keadaan saat demonstrasi, sehingga angkanya semakin berkurang	- Meningkat perusahaan / masyarakat mengurus izin. - Tertibnya pedagang kaki lima dalam berjualan diruas jalan dan pasar didalam kota Bangkinang. - Menutup prostitusi dan perjudian dalam wilayah kabupaten Kampar. - Meningkatnya kepatuhan badan usaha dalam mengurus perizinan. - Telah dilaksanakan Diklatsar 4 angkatan. - Demonstrasi pesertanya sudah tertib dan terkendali.
2.	- Kegagalan	- Demonstrasi masih ada dari masyarakat terhadap pimpinan. - Masih banyak perusahaan ilegal yang belum terdata. - Masih banyak perusahaan yang menunggak membayar pajak. - Penegakan Peraturan Daerah belum didukung sarana dan prasarana.	- Masih ada badan usaha yang tidak mau mengurus izin. - Perusahaan masih ada yang tidak memenuhi kewajibannya. - Sarana dan Prasarana administrasi dan mobilitas belum memadai. - Belum tersedianya tenaga yang berpendidikan Sarjana Hukum.
3.	- Kendala	- Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan personil. - Partisipasi dan tingkat kepedulian masyarakat masih rendah. - Belum terlaksananya koordinasi antar dinas/instansi dengan baik. - Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat /perusahaan untuk menyelesaikan masalah. - Masih ada PNS yang tidak disiplin.	- Masih ada tenaga kontrak yang belum mengikut Diklatsar. - Ditemuinya perusahaan yang ilegal. - Masih ada pelaksanaan Peraturan Daerah yang tidak berjalan. - Banyak pelanggaran yang didiamkan - Mempunyai dampak terhadap sistim dan keberhasilan kerja.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan urusan Penegakan Perda dan Lainnya, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakanya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2017
KABUPATEN KAMPAR

	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja / Program (outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018	
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10/4)
Urusan wajib										
1.05.1.05.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terselenggaranya administrasi perkantoran**	**100%**	**95%**	**100%**	**95%**	**95%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.05.1.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	83%	100%	83%	83%	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	93%	100%	93%	93%	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlasananya jasa perbaikan peralatan kerja	100%	79%	100%	79%	79%	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	78%	100%	78%	78%	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	80%	100%	80%	80%	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	47%	100%	47%	47%	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Koran dan majalah	100%	75%	100%	75%	75%	100%	**100%**	**100%**
1.05.1.05.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	100%	79%	100%	79%	79%	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	100%	94%	100%	94%	94%	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.01.10	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	100%	**97%**	100%	**97%**	**97%**	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.01.22	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	100%	**92%**	-	**92%**	**92%**	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**	**Tersedianya sarana dan prasarana bagi aparatur**	100%	**91%**	**100%**	**91%**	**91%**	**100%**	100%	100%

1.05.1.05.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	**100%**	-	-	-	100%	100%
1.05.1.05.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan	100%	**83%**	100%	**83%**	**83%**	100%	**100%**	**100%**
1.05.1.05.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	100%	**73%**	100%	**73%**	**73%**	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Terwujudnya disiplin aparatur**	100%	**99%**	100%	**99%**	**99%**	**100%**	100%	100%
1.05.1.05.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	**%**	100%	**%**	**%**	-	100%	100%
1.05.1.05.01.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	100%	**94%**	100%	**94%**	**94%**	**398 Anggota**	100%	100%
1.05.1.05.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	**%**	100%	**%**	**%**	-	100%	100%
1.05.1.05.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur**	100%	**87%**	100%	**87%**	**87%**	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.05.08	Latihan dan Atraksi Marching Band	Terlaksanaya Latihan dan Atraksi Marching Band	100%	87%	100%	87%	87%	100%	**100%**	**100%**
1.05.1.05.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Terwujudnya laporan kinerja SKPD yang baik**	**100 %**	**0%**	100%	**0%**	**0%**	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**100%**	**0%**	100%	**0%**	**0%**	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	**100%**	**0%**	100%	**0%**	**0%**	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.06.08	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya Renstra Satpol. PP	100%	**0%**	-	**0%**	**0%**	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.15	**Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**	**Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**	100%	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%
1.05.1.05.01.15.07	Peningkatan pelayanan penanggulangan bhaya kebkaran	Terlaksananya penanggulangan bahaya kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
1.05.1.05.01.16	**Program Pemeliharaan Kontrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**	**Terlaksanaya Pemeliharaan Kontrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**	100%	**86%**	100%	**86%**	**86%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.05.1.05.01.16.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan	100%	**100%**	100%	**100%**	**100%**	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.16.08	Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kampar	Terlaksananya Patroli dan Pengawasan Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kampar	100%	**98%**	100%	**98%**	**98%**	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.16.09	Pengamanan Pemilu	Terlaksananya Pengamanan Pemilu	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.16.10	Kegiatan Tim Justisi Dalam Penertiban Perda	Terlaksananya Kegiatan Tim Justisi Dalam Penertiban Perda	100%	99%	100%	99%	99%	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.16.11	Meningkatkan Keterampilan dan Ketahanan Anggota Sat Pol PP	Terwujudnya Keterampilan dan Ketahanan Anggota Sat Pol PP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.16.13	Pengamanan PORPROV RIAU	Terlaksananya pengamanan PORPROV Riau	100%	100%	100%	100%	100%			
1.05.1.05.01.16.16	Pengamanan dan Pengawalan (PAMWAL) Pejabat dan Orang-	Terlaksananya Pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang2	100%	0%	100%	0%	0%	100%	**100%**	**100%**

	Orang Penting	penting								
1.05.1.05.01.16.17	Pengamanan (PAM) Tempat-Tempat Penting	Terlaksananya pengamanan tempat2 penting	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.23	**Program Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan**	**Meningkatnya Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan**	100**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	100%
1.05.1.05.01.23.01	Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan Anggota Sat Pol PP	Meningkatnya Kapasitas dan Kesamaptaan Anggota Sat Pol PP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Perbup No.60 Tahun 2016 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. Merumuskan Kebijaksanaan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati;
b. Menyusun program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
c. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
d. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
e. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah;
f. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah;
g. Melakukan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Organisasi;
h. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol. PP Kabupaten Kampar mengacu kepada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Satpol. PP merupakan unsur perencana penyelenggaraan penertiban dan keamanan. Struktur organisasi Satpol. PP Kabupaten Kampar.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (thn n-2)	Tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	Tahun 2016 (thn n-2)	Tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Peningkatan Latihan dan Atraksi Marching Band	100%	Meningkatnya kemampuan Anggota Satpol PP	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	Terealisirnya kegiatan Latihan dan atraksi Marching Band
2	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran		Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	27 Orang	27 Orang	70 Orang	70 Orang	27 Orang	27 Orang	70 Orang	70 Orang	Terealisasinya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
3	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	0.003 % Standar SPM 1 Org/ RT	Meningkatnya kemampuan Anggota Sat Linmas Kecamatan Kabupaten Kampar	42 Orang	42 Orang	42 Orang	42 Orang	42 Orang	42 Orang	42 Orang	42 Orang	Terealisasinya peningkatan keamanan lingkungan bersama Linmas
4.	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50 %	Tersedianya Pengamanan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.	270 OH selama 1 Tahun	250 OH selama 1 Tahun	250 OH selama 1 Tahun	300 OH selama 1 Tahun	270 OH selama 1 Tahun	250 OH selama 1 Tahun	250 OH selama 1 Tahun	300 OH selama 1 Tahun	Terealisasinya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
5.	Terlaksananya Pelaksanaan patroli dan pengawasan lingkungan masyarakat dan Penertiban PNS, Anak Sekolah dan Mahasiswa	1 x Patroli dalam sehari Standar SPM 3 x Patroli dalam sehari	Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Masyarakat dan Penertiban PNS, Anak Sekolah dan Mahasiswa	Patrol 250 OH dan 229 OH Penertiban Anak Sekolah	48 x turun selama 1 Tahun	80 x turun selama 1 Tahun	80 x turun selama 1 Tahun	Patrol 250 OH dan 229 OH Penertiban Anak Sekolah	48 x turun selama 1 Tahun	80 x turun selama 1 Tahun	80 x turun selama 1 Tahun	Terealisasinya pengawasan lingkungan Masyarakat dan Penertiban PNS, Anak Sekolah dan Mahasiswa
6.	Terlaksananya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di lingkungan Masyarakat		Penertiban Perda Kabupaten Kampar	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100 %	Satpol. PP akan meningkatkan kamtibmas, penegakan perda dan demontrasi

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol. PP

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang tercantum dalam pasal 255 dan 256 yaitu : untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja ini kemudian diatur dalam petunjuk teknis Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar maka kondisi yang diinginkan agar fungsi perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif yang menjadi fokus perhatian Satpol. PP Kabupaten Kampar.

Satpol. PP dalam menjalankan tugas pokok dan Fungsinya terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Dalam penetapan pelaksanaan Peraturan Daerah yang mana pelaksanaanya adalah Dinas / Badan / Kantor Teknis sesuai dengan Peraturan Daerah . Sedangkan Koordinasi Dinas Pelaksana dengan Satpol.PP Kab.Kampar sebagai petugas penegakan PERDA belum berjalan dengan baik.
2. Masih kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat / pengusaha / pedagang untuk mematuhi Peraturan Daerah terutama di bidang Perizinan dan ketaatan membayar pajak.
3. Sarana dan Prasarana sebagi pendukung aktifitas organisasi untuk Penertiban dan Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah masih belum memadai sesuai dengan wilayah Kabupaten Kampar yaitu 21 Kecamatan.
4. Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang ada perlu ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya.
5. Kompensasi sumber daya aparatur belum memadai dalam melaksanakan tugas.
6. Kurangnya dukungan dana dan transportasi untuk operasional anggota ke lapangan.
7. Peraturan Daerah yang ada sekarang masih harus disosialisasikan kepada masyarakat/ pengusaha dan pedagang karena masih ada yang belum mengetahuinya.

Sementara itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satpol.PP juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan yaitu ; lingkungan dalam (Internal) dan lingkungan luar (Ekstenal). Adapun factor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1). Lingkungan Internal.

Faktor Lingkungan Internal terdiri dari Faktor Kekuatan dan Faktor Kelemahan, sebagai berikut :

Kekuatan :

- Adanya dasar hukum dan kebijakan dipakai sebagai landasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- Adanya sumber daya manusia aparatur
- Dukungan pimpinan.
- Adanya kemitraan antara Pemerintah, TNI, POLRI, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat
- Tugas Pokok dan fungsi cenderung dipakai oleh sebahagian aparatur

Kelemahan

- Kompetisi sumber daya aparatur belum memadai.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung aktivitas organisasi.
- Kurang dukungan dana.
- Lemahnya koordinasi baik antar dinas / instansi maupun dengan aparatur wilayah

2). Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor Lingkungan Eksternal terdiri dari Faktor Peluang dan Faktor Ancaman, sebagai berikut :

Peluang :

- Keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Adanya PerBup Kabupaten Kampar Nomor 60 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.
- Komitmen untuk menegakan supremasi hukum yang mulai tumbuh.
- Komitmen dari DPRD dan Pemerintah Kab. Kampar
- Tumbuhnya budaya yang tertib dan teratur dalam suasana yang tentram.

Ancaman :

- Krisis yang berkepanjangan telah merubah etika (Moral) dari masyarakat Kampar.
- Masih terjadinya Miss Comunication antara Pemerintah Kampar dengan masyarakat .
- Demokrasi yang cenderung diikuti pula kekerasan dengan tidak mengindahkan etika tanggung jawab.
- Terdapatnya kebijakan yang tidak respensif dan aspiratif.

3. Faktor – faktor Kunci Keberhasilan
   a. Adanya koordinasi, komunikasi dan partisipasi antara Masyarakat,Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Pemerintah Pusat.

   b. Adanya peningkatan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjawab tantangan tugas dan dinamika sosial yang semakin berkembang di dalam era masyarakat yang global.
   c. Adanya komitmen kerjasama yang sinergis dengan Instansi terkait khususnya instansi dibidang Keamanan dan Ketertiban dan tokoh masyarakat untuk menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
   d. Adanya peraturan, hukum dan hak asasi manusia dengan dilandasi nilai-nilai budaya sebagai warisan leluhur bangsa dalam pelaksanaan operasi dilapangan.
   e. Adanya kesepakatan masyarakat dan pemerintah agar tetap mewaspadai upaya-upaya tertentu yang dapat mengancam keutuhan nasional.
   f. Adanya peluang membangun jiwa dan semangat aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang bercorak Praja Wibawa dengan menjaga.kehormatan dan harga diri sebagai anggota Korps, untuk dapat membantu pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Satpol. PP Kampar	Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan adminstrasi perkantoran	12 Bln	9.925.886.564	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Satpol. PP Kampar	Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan adminstrasi perkantoran	12 Bln	10.385.676.927	
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	44.400.000	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	64.200.000	
	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya Jasa kebersihan kantor	12 Bln	47.485.760	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya Jasa kebersihan kantor	12 Bln	86.489.204	
	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Satpol. PP Kampar	Tersedianya peralatan kerja	12 Bln	19.003.000	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Satpol. PP Kampar	Tersedianya peralatan kerja	12 Bln	23.803.000	
	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Satpol. PP Kampar	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	26.022.660	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Satpol. PP Kampar	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bln	29.442.723	
	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	18.680.000	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	38.300.000	
	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya program kerja kantor	12 Bln	200.205.144	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya program kerja kantor	12 Bln	-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol. PP Kampar	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 Bln	30.240.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol. PP Kampar	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - Undangan	12 Bln	30.240.000	

	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya makan minum rapat dan tamu	12 Bln	126.925.000	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya makan minum rapat dan tamu	12 Bln	126.850.000	
	Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bln	547.100.000	Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bln	592.512.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Satpol. PP Kampar	Tersedianya pelayanan kepada masyarakat	12 Bln	8.750.625.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Satpol. PP Kampar	Tersedianya pelayanan kepada masyarakat	12 Bln	9.278.640.000	
	Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bln	115.200.000	Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bln	115.200.000	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**										
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jabatan	Satpol. PP Kampar	Peningkatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12 Bln	40.452.250	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jabatan	Satpol. PP Kampar	Peningkatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12 Bln	42.733.450	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Satpol. PP Kampar	Peningkatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bln	325.728.000	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Satpol. PP Kampar	Peningkatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bln	382.200.000,	
3	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**										
	Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan	Satpol. PP Kampar	Tersedianya Pengadaan pakaian kerja lapangan	12 Bln	211.680.000	Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan	Satpol. PP Kampar	-	-	-	

4	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya**										
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Satpol. PP Kampar	Aparatur Sipil Negara yang memahami regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Org	9.650.000	
	Kegiatan Latihan dan Atraksi Marching Band	Satpol. PP Kampar	Peningkatan latihan dan atraksi marching band	12 Bln	17.800.000	Kegiatan Latihan dan Atraksi Marching Band	Satpol. PP Kampar	Peningkatan latihan dan atraksi marching band	12 Bln	104.566.000	
	Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya Bimtek penatausahaan barang milik daerah	12 Bln	8.650.000	Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya Bimtek penatausahaan barang milik daerah	-	-	
5	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**										
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya kinerja Satpol.PP	12 Bln	1.500.000	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya kinerja Satpol.PP	12 Bln	1.500.000	
	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya administrasi keuangan akhir tahun	12 Bln	1.500.000	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya administrasi keuangan akhir tahun	12 Bln	1.500.000	
6	**Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**										
	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	12 Bln	127.618.300	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	12 Bln	841.757.235	

7	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**										
	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Satpol. PP Kampar	Pelaksanaan pengamanan monitoring	12 Bln	83.050.000	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Satpol. PP Kampar	Pelaksanaan pengamanan monitoring	12 Bln	109.550.000	
	Kegiatan Pelaksanaan patroli dan pengawasanlingkungan masyarakat	Satpol. PP Kampar	Pengamanan pengawasan lingkungan masyarakat dalamwilayah Kab. Kampar	12 Bln	155.470.000	Kegiatan Pelaksanaan patroli dan pengawasan lingkungan masyarakat	Satpol. PP Kampar	Pengamanan pengawasan lingkungan masyarakat dalamwilayah Kab. Kampar	12 Bln	590.725.000	
	Kegiatan Pengamanan Pemilu/Pemilukada	Satpol. PP Kampar	Penertiban pengamanan pemilu/pemilukada dan legislatif	12 Bln	242.835.000	Kegiatan Pengamanan Pemilu/Pemilukada	Satpol. PP Kampar	Penertiban pengamanan pemilu/pemilukada dan legislatif	12 Bln	590.725.000	
	Kegiatan TIM Justisi Dalam Penertiban Perda	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya penertiban Perda Kab. Kampar	12 Bln	1.118.863.500	Kegiatan TIM Justisi Dalam Penertiban Perda	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya penertiban Perda Kab. Kampar	12 Bln	379.407.500	
	Kegiatan Meningkatkan Keterampilan dan Ketahanan Anggota Satpol. PP	Satpol. PP Kampar	Meningkatkan keterampilan dan ketahanan anggota Satpol. PP	12 Bln	9.211.600	Kegiatan Meningkatkan Keterampilan dan Ketahanan Anggota Satpol. PP	Satpol. PP Kampar	Meningkatkan keterampilan dan ketahanan anggota Satpol. PP	12 Bln	95.276.000	
	Pengamanan PORPROV RIAU	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya PORPROV Riau	15 Hari	2.367.787.000	Pengamanan PORPROV RIAU	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya PORPROV Riau	-	-	
	Pengamanan dan Pengawalan (PAMWAL) Pejabat dan Orang-Orang Penting	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya pengamanan pejabat dan orang2 penting	12 Bln	78.200.000	Pengamanan dan Pengawalan (PAMWAL) Pejabat dan Orang-Orang Penting	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya pengamanan pejabat dan orang2 penting	-	-	
	Pengamanan (PAM) Tempat-Tempat Penting	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya pengamanan tempat2 penting	12 Bln	578.522.000	Pengamanan (PAM) Tempat-Tempat Penting	Satpol. PP Kampar	Terlaksananya pengamanan tempat2 penting	-	-	

9	**Program Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan**										
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan Anggota Satpol. PP	Satpol. PP Kampar	Meningkatkan pengembangan kapasitas dan kesamaptaan	12 Bln	23.575.000	Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan Anggota Satpol. PP	Satpol. PP Kampar	Meningkatkan pengembangan kapasitas dan kesamaptaan	12 Bln	70.180.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	catatan
NIHIL					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 255) : "Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja". Dengan demikian Polisi Pamong Praja mempunyai 2 peran yaitu :

1. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
2. Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan
    a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
    b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
    c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
    d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pada tanggal 4 Maret 2018 yang lalu, melalui Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke 65 dan Hari Ulang Tahun Satuan Perlindungan Masyarakat ke 55 Tingkat Nasional di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, Menteri Dalam Negeri dalam Amanah Upacara menyampaikan bahwa Anggaran SATPOL PP wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah, khususnya untuk membiayai Program dan Kegiatan yang berkaiatan dengan upaya menyelesaikan Permasalahan yang dihadapi Satpol PP selama ini, yaitu keterbatasan dibidang SDM, Sarana dan Prasarana, dan keterbatasan Anggaran Kegiatan Teknis Operasional.

Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan segera disahkan Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang SATPOL PP. Selain itu, khusus untuk peningkatan SDM anggota SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran, maka telah ditetapkan Badan Diklat SATPOL PP dan DAMKAR di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, oleh karena itu diwajibakan bagi semua Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia untuk menyediakan anggaran Diklat Teknis dan Fungsional bagi anggota Satpol PP dan Damkar.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Visi yang telah ditetapkan dapat dicapai jika dirumuskan terlebih dahulu ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah, berupa tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi organisasi secara lebih detil, lebih terinci, lebih tergambar dengan jelas dan sekaligus berguna sebagai acuan dalam menentukan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan serta hasil akhir yang akan dicapai.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kondisi yang diharapkan yaitu :

Tujuan Pertama yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan pokok dibidang Peraturan Daerah. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu menghasilkan rencana Penertiban Daerah yang aman dan berkualitas memiliki tujuan, sasaran, target dan tepat waktu, baik berupa jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan yaitu *“* Meningkatnya rasa aman, tertib dan tentram dalam masyarakat *“*

Tujuan Kedua yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan pokok dibidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Yaitu " Mewujudkan wibawa Pemerintah Daerah dengan tindakan Profesional Aparatur Satuan Poilisi Pamong Praja"

Tujuan Ketiga Mewujudkan upaya pembinaan dan pelatihan linmas yang makin professional dan berkualitas.

Tujuan ketiga yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja lima tahun kedepan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a) Menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman, tentram, tertib dan teratur.

b) Mewujudkan aktifitas kehidupan masyarakat aman dan tentram yang berjalan dengan tetap berpijak pada peraturan, ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku.

c) Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam memelihara, menangani dan mengendalikan setiap kendala yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban.

d) Menertibkan setiap pelanggaran yang terjadi baik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah maupun terhadap keputusan yang menjadi keputusan daerah.

e) Menindak setiap pelanggaran Perda, Perbub dan Keputusan Kepala Daerah yang ada secara tegas dengan proses yang cepat, tepat dan transparan.

f) Meningkatnya budaya di masyarakat dengan mematuhi setiap peraturan perundang – undangan yang berlaku.

g) Menjaga dan mengendalikan fasilitas umum sebagai sarana kabupaten sesuai funsi dan peruntukannya.

h) Tercapainya ketentraman dan ketertiban diwilayah hokum Kabupaten Kampar yang terwujud dan terpelihara dalam wacana kehidupan pergaulan masyarakat.

i) Membentuk sosok aparat yang tegas, bersih dan berwibawa dalam pelaksanaan tugas.

j) Meningkatnya Pembinaan Linmas melalui pendidikan dan latihan.

k) Meningkatnya upaya penanggulangan bencana kebakaran dan alam.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan pagu indikatif yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, sebagai OPD yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan Dasar bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Kampar dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 13.389.755.312,00 selama tahun 2019 akan menyelenggarakan 8 Program dan 24 Kegiatan yang terdiri atas 14 kegiatan lokalitas dan 10 kegiatan teknis.

Adapun Program dan kegiatan lokalitas adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;

       Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dipergunakan untuk membayar tagihan Telepon, Air, Listrik, dan Jaringan Internet/Faximile kantor Satpol PP dan Kantor Bidang Pemadam Kebakaran. Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 64,200,000 untuk 1 tahun anggaran.
    2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

       Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dipergunakan untuk pembelian perlatan dan perlengkapan kebersihan serta membayar Honor Petugas Kebersihan kantor Satpol PP dan Kantor Bidang Pemadam Kebakaran. Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 86.489.204 untuk 1 tahun anggaran.
    3) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

       Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja dipergunakan untuk perbaikan peralatan kerja kantor Satpol PP dan Kantor Bidang Pemadam Kebakaran. Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 23.803.000 untuk 1 tahun anggaran.
    4) Penyediaan Alat Tulis Kantor

       Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkantoran, Total anggaran yang dibutuhkan Rp. 29.442.723 untuk 1 Tahun anggaran
    5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

       Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkantoran. Total anggaran yang dibutuhkan Rp. 38.300.000 untuk 1 Tahun anggaran
    6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    8) Penyediaan Makanan dan Minuman
    9) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah
    10) Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas merupakan kegiatan lokalitas yang sangat besar menghabiskan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dengan porsi lebih dari 60% anggaran. Jumlah anggaran yang wajib disediakan untuk membiayai Gaji 412 orang Tenaga Harian Lepas adalah sebesar Rp 9.278.640.000.

11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   1) Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
   2) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   1) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   1) Latihan dan Atraksi Marching Band
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Untuk Kegiatan teknis yang berhubungan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
   1) Pelatihan Dasar Perlindungan Masyarakat bagi Anggota Linmas

      Kegiatan Pelatihan Dasar Perlindungan Masyarakat bagi Anggota Linmas dipergunakan untuk penyediakan dana dalam rangka pembekalan anggota SATLINMAS se Kabupaten Kampar pada tahun 2018. Kegiatan ini merupakan Tugas Pokok dan Fungsi SATPOL PP dibidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Bentuk kegiatan lainnya yang seharusnya juga disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar adalah pembentukan SATLINMAS Desa se Kabupaten Kampar yang merupakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Menurut ketentuan Permendagri tersebut, setiap Desa wajib dibentuk SATLINMAS yang berjumlah 5 regu dengan anggota 10 orang per regu, ditambah masing-masing 1 orang komandan setiap regu (Danru) dan 1 orang Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) SATLINMAS, sehingga jumlah Personil yang dibutuhkan adalah sebanyak 56 orang setiap Desa, akan

tetapi mengingat besarnya anggaran pembentukan SATLINMAS Desa tersebut, maka kegiatan ini ditunda sampai pulihnya ekonomi Negara dan Daerah kita, sebagai penggantinya diusulkan kegiatan diatas yang merupakan pembinaan bagi anggota Satlinmas yang dibentuk disetiap kecamatan. Total anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 124.333.200.

2. Program Pemeliharaan Kontrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
    1) Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja
    2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

       Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dipergunakan untuk membiayai dana yang dibutuhkan OPD Satpol PP mulai dari tahapan Perencanaan Program dan Kegiatan, Penyusunan Renja dan Perubahan Renja OPD, Penyusunan RKA, DPA, DPPA sampai dengan Pengawasan Pelaksaan Kegiatan, Evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan. Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 109.550.000 untuk 1 tahun anggaran.
    3) Meningkatkan Keterampilan dan Ketahanan Anggota Sat Pol PP
    4) Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kampar

       Kegiatan PATROLI diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan ruang lingkup Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Kegiatan ini merupakan unsur pelayanan dasar yang wajib disediakan bagi masyarakat sebagaimana Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang diatur dalam Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Dalam Ketentuan tentang SPM tersebut, Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibumas) wajib dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 hari per wilayah kecamatan. Pada tahun-tahun yang lalu, kegiatan ini baru mencakup kegiatan Patroli dalam kota Bangkinang, yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Sehubungan dengan batas waktu pencapaian SPM Patroli adalah pada tahun 2015 yang lalu, maka pada tahun 2018 kedepan kegiatan ini merupakan hal yang tidak dapat ditawar dan ditunda lagi pelaksanaannya, oleh karena itu anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 700,830,000.

5) Pengamanan Pemilu/Pemilukada

Kegiatan Pengamanan Pemilu/Pemilukada dipergunakan untuk menyediakan anggaran Pengamanan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, serta Pelaksanaan Penghitungan Real Count Satpol PP yang pernah dilaksanakan pada Pemilu Tahun 2019. Total anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 250.700.000.

6) Kegiatan Tim Justisi Dalam Penertiban Perda

Kegiatan Tim Justisi Dalam Penertiban Perda dipergunakan untuk menyediakan anggaran Operasi Tim Justisi Kabupaten Kampar dalam Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah. Total anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 379.407.500.

7) Pengamanan dan Pengawalan Pejabat dan Orang- orang penting

Kegiatan Pengamanan dan Pengawalan atau disebut juga dengan PAMWAL diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan ruang lingkup Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Kegiatan PAMWAL adalah bentuk Pengamanan dan Pengawalan yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar kepada Pejabat dan Orang-orang penting berupa Pengamanan dan Pengawalan dari tempat keberangkatan sampai di tempat acara, serta Pengamanan oleh Regu Pengamanan selama dalam acara Pejabat dan Orang-orang Penting yang berkunjung dalam wilayah Kabupaten Kampar. Total anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 326,296,000.

8) Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja, ruang lingkup unjuk rasa adalah berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, ataupun mimbar bebas. Unjuk rasa umumnya telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya dari pihak Kepolisian memberitahukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan ruang keadaan yang dikategorikan kerusuhan massa adalah: Massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti: merusak fasilitas umum dan instalasi pemerintah; melakukan pembakaran benda-

benda yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas; melakukan kekerasan terhadap orang/masyarakat lain. Massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan yang melawan perintah petugas/aparat pengamanan antara lain: melewati garis batas yang telah diberikan petugas; melakukan tindakan kekerasan/anarkhis kepada petugas pengamanan.

Berdasarkan data jumlah demonstrasi di Kabupaten sepanjang tahun 2017-2022, diperlukan anggaran untuk antisipasi permasalahan tersebut. Total anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 885,680,000.

3. Program Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan

   1) Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan Anggota Sat Pol PP

      Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan Anggota Sat Pol PP dipergunakan untuk menyediakan anggaran Operasional Latihan Beladiri, PBB, dan Bidang Kesamaptaan lainnya bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. Total anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini selama 1 tahun adalah sebesar Rp 70.180.000.

Untuk lebih jelasnya rincian Rumuasan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 serta Prakiraan Maju Tahun 2020 OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 3.3. dibawah ini:

Tabel 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN KAMPAR

Urusan Pemerintahan : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**10.385.676.927**				**11.126.264.000**
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar	12 Bln	64.200.000	APBD		12 Bln	70.620.000
08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Kampar	12 Bln	86.489.204	APBD		12 Bln	87.300.000
09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tesedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kab. Kampar	12 Bln	23.803.000	APBD		12 Bln	26.183.000
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Kampar	12 Bln	29.442.723	APBD		12 Bln	32386000
11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kampar	12 Bln	38.300.000	APBD		12 Bln	38300000

13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	12 Bln	-	APBD		12 Bln	
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Kampar	12 Bln	30.240.000	APBD		12 Bln	30.240.000
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kab. Kampar	12 Bln	126.850.000	APBD		12 Bln	139.535.000
18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Kab. Kampar	12 Bln	592.512.000	APBD		12 Bln	651.700.000
19.	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas	Kab. Kampar	12 Bln	9.278.640.000	APBD		12 Bln	9.450.000.000
22.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Kab. Kampar	12 Bln	115.200.000	APBD		12 Bln	-
02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**424.933.450,00**				**546.903.000**
23.	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan	Kab. Kampar	12 Bln	42.733.450	APBD		12 Bln	60.000.000
24.	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Kampar	12 Bln	382.200.000	APBD		12 Bln	306.903.000
25.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kab. Kampar	12 Bln		APBD		12 Bln	180.000.000
03	**Program Peningkatan**								**683.000.000**

	Disiplin Aparatur								
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	Kab. Kampar			APBD		1 Keg	324.100.000
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedinaya pakaian olahraga Satpol. PP	Kab. Kampar			APBD		1 Keg	138.900.000
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian PDU	Kab. Kampar			APBD		1 Keg	40.000.000
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Marching Band Satpol. PP	Kab. Kampar			APBD		1 Keg	180.000.000
05.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				**114.216.000,00**				**632.746.000**
03.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Kampar	1 Org	9.650.000	APBD		1 Org	
04.	Pendidikan dan pelatihan formal		Kab. Kampar			APBD		2 Org	90.000.000
08.	Latihan dan Atraksi Marching Band	Terlaksananya Latihan dan Atraksi Marching Band	Kab. Kampar	12 Bln	104.566.000	APBD		12 Bln	536.566.000
09.	Asuransi Anggota Satpol PP		Kab. Kampar			APBD		12 Bln	6.180.000
06.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**				**3.000.0000**				**4.000.0000**

01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar	12 Bln	1.500.000	APBD		12 Bln	2.000.000
04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Kampar	12 Bln	1.500.000	APBD		12 Bln	2.000.000
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran				**841.757.235**				**1.300.000.000**
12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran		Kab. Kampar	12 Bln	841.757.235	APBD		250 Desa	1.300.000.000
15.	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**				**124.333.200**				**136.700.000**
07.	Pelatihan Dasar Perlindungan Masyarakat bagi Anggota Linmas	Terlaksananya Pelatihan Dasar Perlindungan Masyarakat bagi Anggota Linmas	Kab. Kampar	1 Keg	124.333.200	APBD		1 Keg	136.700.000
16.	**Program Pemeliharaan Kontrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**				**1.425.658.500**				**1.152.100.000**
05.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Kampar	12 Bln	109.550.000	APBD		12 Bln	120.000.000
06.	Meningkatkan Keterampilan dan Ketahanan Anggota Sat Pol PP	Meningkatnya Keterampilan dan Ketahanan Anggota Sat Pol PP	Kab. Kampar	12 Bln	95.276.000	APBD		12 Bln	104.000.000

08.	Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kampar	Dilaksanakannya Patroli dan Pengawasan Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kampar	Kab. Kampar	12 Bln	590.725.000	APBD		12 Bln	511.100.000
09.	Pengamanan Pemilu/Pemilukada 2019	Terlaksananya Pengamanan Pemilukada	Kab. Kampar	12 Bln	250.700.000	APBD		12 Bln	-
10.	Kegiatan Tim Justisi Dalam Penertiban Perda	Terlaksananya Kegiatan Tim Justisi Dalam Penertiban Perda	Kab. Kampar	12 Bln	379.407.500	APBD		12 Bln	417.000.000
23	**Program Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan**				**70.180.000**				**77.000.000**
01.	Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan Anggota Sat Pol PP	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan Anggota Sat Pol PP	Kab. Kampar	12 Bln	70.180.000	APBD		12 Bln	77.000.000
	JUMLAH				**13.389.755.312**				**16.599.889.000**

BAB. IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar merupakan dokumen perencanaan tahunan dan sebagai bagian dari draf Rencana Strategi (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar 2017-2022 yang memuat program dan kegiatan tahun 2019 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2019 ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam tahun 2019, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2019 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dan sebagai pedoman seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan visi dan misi yang telah menjadi komitmen bersama.